

Judul : DPR akui kinerja 2018 menurun
Tanggal : Kamis, 06 Desember 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

DPR Akui Kinerja 2018 Menurun

[JAKARTA] Sebanyak 529 atau 94% dari total 560 anggota DPR periode 2014-2019 kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2019. Sebanyak 349 di antaranya menempati nomor urut 1 di sejumlah daerah pemilihan sehingga berpeluang besar untuk terpilih kembali.

Persiapan menuju Pileg 2019 inilah yang ditengarai menurunkan kinerja wakil rakyat dalam melakukan fungsi-fungsinya terutama dalam hal legislasi dan pengawasan.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengakui adanya penurunan aktivitas anggota DPR meski ia menolak disebut adanya penurunan hasil kerja. Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro mengakui, kinerja legislasi DPR memang menurun pada 2018. Namun, ia menuduh penyebabnya bukan karena aktivitas anggota parlemen melainkan kurangnya kerja sama pemerintah.

Anggota Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengakui ada degradasi etos, kesadaran, dan pemahaman kebanyakan anggota dewan saat ini, khususnya menyangkut posisi sebagai representasi rakyat.

Fadli Zon menyatakan, kinerja DPR tidak menurun walau di tengah kesibukan menjalani berbagai aktivitas politik. Ia mengklarifikasi bahwa selama ini ada kesan seolah dirinya memohon agar masyarakat memahami menurunnya kinerja DPR karena kesibukan aktivitas politik.

Politikus Gerindra ini mengakui anggota dewan memang sedang banyak bekerja di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Namun, baginya, kinerja DPR tidak anjlok sebab berinteraksi dengan masyarakat juga menjadi bagian dari tugas DPR.

“Bertemu dengan konstituen karena mereka selain anggota DPR juga menjadi caleg DPR dan bahkan ada juga yang jadi tim pemenangan (capres),” kata Fadli.

Ditambahkan, DPR punya fungsi anggaran yakni menyangkut penyusuran dan pembahasan anggaran negara, fungsi pengawasan pemerintah, dan fungsi legislasi menyangkut pembuatan undang-undang, serta fungsi representasi.

“Yang selama ini banyak diributkan hanyalah menyangkut fungsi legislasi,” katanya.

Menurut catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), selama 2018, dari 50 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) baru lima yang terselesaikan menjadi UU. Angka ini menurun dibandingkan 10 UU pada 2016 dan enam UU pada 2017.

Menurut Fadli, fungsi pengawasan, dan anggaran, selama ini dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk fungsi representasi, para anggota dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Dalam melakukannya, anggota dewan turun ke lapangan.

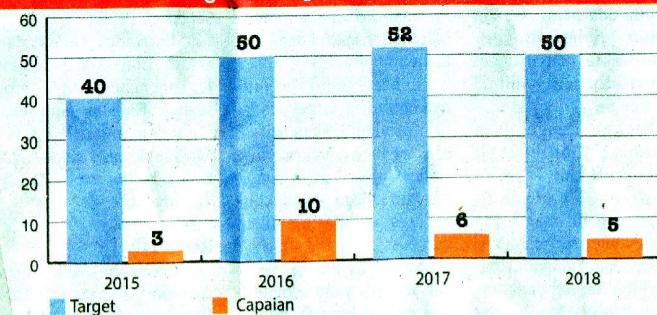
Percentase RUU Prioritas yang Dihadarkan DPR Setiap Tahun



Perbandingan Hasil RUU Prioritas Vs Kumulatif Terbuka Per Tahun



Target dan Capaian RUU Prioritas





KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

"Kalau ada penurunan, itu yang saya kira wajar penurunan aktivitasnya. Tetapi bukan penurunan dari hasil kerjanya," ujar Fadli.

Seirama dengan Fadli, Andreas Hugo Pareira menyatakan, tak adil bila alat ukur kinerja DPR sekadar fungsi legislasi sebab hal itu bergantung juga dengan kinerja pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa tak diperlukan banyak UU dan peraturan baru. "Jadi soal legislasi ini bukan hanya kerja DPR. Tapi pemerintah juga. Sementara sikap pemerintah juga seperti itu," kata Andreas.

Anggota DPR banyak melakukan kunjungan kerja, kata Andreas, itu karena fungsi pengawasan dan representasi DPR. Sebagai contoh, untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desa, setiap anggota dewan pasti menerima banyak sekali keluhan masyarakat. Keluhan itu dijadikan aspirasi yang harus dibawa ke tingkat pusat, dan disampaikan ke pemerintah untuk ditangani.

"Di rapat-rapat DPR, itulah yang kita sampaikan ke pemerintah, kita dorong untuk diberi solusi. Itulah fungsi pengawasan," katanya.

Tingkat Kehadiran

Andreas menekankan, ia bukan hendak mencari pembenaran seakan DPR saat ini lebih baik. Ia mengakui ada degradasi etos, kesadaran, dan pemahaman kebanyakan anggota dewan saat ini, khususnya menyangkut posisi sebagai representasi rakyat.

Hal itu tercermin dari rendahnya tingkat kehadiran di rapat paripurna dan rapat-rapat di komisi. Harus diakui, banyak anggota yang merasa tak penting untuk hadir. Hal ini berbeda dengan DPR di periode-periode sebelumnya.

Selain itu, kualitas pembicaraan di DPR juga menurun. Seharusnya DPR, sebagai lembaga Parlemen, lebih banyak berdebat dan berdiskusi. Namun saat ini, debat-debat demikian terasa kurang. "Sekarang pembicaraan politik lebih banyak di luar parlemen," kata dia.

Berdasarkan catatan Formappi, kehadiran anggota parlemen dalam sidang paripurna rata-rata hanya 35,6%. Fadli Zon menilai, tak adil bila ukuran kehadiran itu dijadikan sebagai indikator kinerja DPR.

DPR tak bisa disamakan dengan pegawai kantoran

yang masuk pukul 09.00 pagi dan pulang pukul 17.00 WIB. Di parlemen negara mana pun, tak ada parlemen yang dipatok bekerja seperti pegawai kantoran.

"Kami kerja politik. Yang bahkan kerap jam kerjanya melewati jam kerja warga biasa," imbuhnya.

Ia mengakui ada anggota dewan yang tak bisa hadir di setiap rapat paripurna. Namun harus diketahui, bahwa setiap ketidakhadiran harus dengan alasan resmi. Dan biasanya para anggota tak bisa hadir karena melakukan kunjungan kerja ke dapilnya.

"Mereka wajib memberi surat agar dapat izin. Dan alasannya karena sedang ada tugas lainnya," kata Fadli.

Sedangkan Nizar Zahro mengatakan, rendahnya pencapaian legislasi DPR bukan murni kelalaian DPR. Selama ini banyak pembahasan RUU yang sulit disahkan lantaran perbedaan sikap di internal pemerintah sendiri.

"Saya kira komitmen pemerintah, terutama menyatakan suara antar kementerian dan lembaga sebelum datang ke DPR membahas RUU

menjadi faktor penting," ujar Nizar, Kamis (6/12).

Menurutnya, masih ada keengganan pihak kementerian tertentu untuk hadir dalam pembahasan RUU di DPR. Meski target Prolegnas dipastikan tidak akan tercapai, DPR berharap separuh dari jumlah itu masih bisa dicapai.

Nizar mengaku tidak yakin target prolegnas tahun ini akan tercapai. Karena selain target RUU yang ditetapkan dalam prolegnas masih ada lagi pembahasan RUU baru yang belum masuk prolegnas seperti RUU yang dianggap perlu saat itu.

Dia menyebutkan sejumlah faktor yang membuat target prolegnas DPR itu sulit untuk dicapai setiap periode DPR. Pertama adalah pentingnya konsolidasi internal di DPR sendiri.

Kedua adalah DPR harus mengukur target pencapaian prolegnas sesuai waktu dan kemampuan secara rasional. Ia berharap DPR dan Presiden perlu meninjau kembali jumlah RUU yang akan dibahas karena target pembahasan RUU terlalu tinggi.

"DPR perlu introspek-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

si diri atas prolegnas ini. Menkumham juga bisa lebih menggiatkan pembahasan agar setiap rapat mampu mengatur waktu secara baik,” tandasnya.

Momentum Mengukur

Menurut Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Johnny G Plate, justru menjelang pileg menjadi waktu yang baik untuk mengukur kepiawaian pimpinan DPR dalam mengatur jadwal kegiatan alat kelengkapan DPR agar fungsi DPR dapat tetap berjalan dengan baik.

“Ia mengingatkan, fungsi DPR harus tetap berjalan walaupun saat ini hampir seluruh anggota DPR disibukkan dengan tugas politik yang diisi dengan kampanye Pileg 2019. “Seharusnya fungsi DPR tidak boleh terganggu walaupun sudah masuk ke masa kampanye pemilu dimana banyak anggota DPR adalah juga sebagai caleg yang perlu turun ke dapil untuk sosialisasi dan kampanye,” katanya, Kamis (6/12).

Saat ini, masyarakat pasti tetap mencermati DPR. Karena itu perlu kecekatan para anggota dewan untuk mengatur jadwal kegiatan

dilapil. “Jadwal kampanye masih lebih dari empat bulan dan bisa diatur dengan baik agar kampanye dapat dilakukan di waktu hari libur atau di akhir pekan,” ujarnya.

Anggota DPR Komisi IX, Irma Suryani Chaniago mengakui, menjelang Pileg 2019 hampir sebagian besar anggota DPR akan turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Namun demikian, turun ke dapil bukanlah alasan untuk meninggalkan tugasnya sebagai anggota DPR.

“Insya Allah tidak kendur (menjalankan fungsi sebagai anggota DPR), karena memang ada kunker (kunjungan kerja) terkait tupoksi masing-masing,” kata perempuan politikus Fraksi Nasdem ini, Kamis (6/12).

Anggota Komisi IX yang biasa mengurus bidang tenaga kerja & transmigrasi, kependudukan dan kesehatan periode 2014-2019 itu menuturkan, untuk menyiasati kesibukan di dapil, Fraksi Nasdem memberlakukan kebijakan turun ke daerah secara bergantian. “Biasanya satu fraksi bergantian turun ke dapil,” ungkap Irma.

Masa Reses

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan DPR incumbent seharusnya tidak sulit menggarap daerah pemilihan atau dapil jika efektif memanfaatkan masa reses. Menurut Lucius, masa reses adalah kesempatan DPR lebih dekat konstituennya dan bisa menyerap aspirasinya.

“Jika masa reses dilakukan secara maksimal mestinya anggota DPR sudah lincah menggarap daerah pemilihannya. Sehingga mereka tak seharusnya pontang-panting di masa kampanye seperti sekarang di dapil,” ujar Lucius di Jakarta, Kamis (6/12).

Masa reses, kata Lucius biasanya digunakan oleh anggota DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke dapil. Pasal 211 Tatib DPR menyebutkan, pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan anggota.

“Kalau mereka banyak mangkir di masa kampanye sekarang, itu artinya pada saat reses kemungkinan besar anggota tersebut tidak mengunjungi daerah pemilihannya,” ungkap dia.

Karena itu, Lucius berharap pemilih harus semakin cerdas memilih dengan mempertimbangkan seberapa efektif anggota DPR memanfaatkan masa resesnya. [MJS/Y-7/H-14]